



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan Tunjangan Reses;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioanl;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
20. Peraturan Dearah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai Unsur Penyelenggara Negara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II. (.....

BAB II
BESARAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kemampuan Keuangan Daerah di hitung berdasarkan Besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dasar Penghitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran direncanakan.

Pasal 4

- (1) Rincian Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

a. Pendapatan Umum Daerah			
- Pendapatan Asli Daerah	:	Rp.	77.933.004.819
- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	:	Rp.	22.592.435.526
- Dana Alokasi Umum	:	Rp.	668.382.482.000
Jumlah			Rp. 768.907.922.345
b. Belanja Pegawai		:	Rp. 563.867.912.804
Jumlah			Rp. 205.040.009.541

- (2) Rincian Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan Umum Daerah			
- Pendapatan Asli Daerah	:	Rp.	112.621.999.187
- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	:	Rp.	22.873.358.205
- Dana Alokasi Umum	:	Rp.	656.641.151.000
Jumlah			Rp. 792.136.508.392
b. Belanja Pegawai		:	Rp. 512.127.125.141
Jumlah			Rp. 280.009.383.251

Pasal 5

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 sebesar Rp. 768.907.922.345,- dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp. 563.867.912.804 adalah Rp. 205.040.009.541,- (dua ratus lima milyar sembilan juta lima ratus empat puluh satu rupiah);

(2) Pendapatan. (...)

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 792.136.508.392,- dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp. 512.127.125.141,- adalah Rp. 280.009.383.251,- (dua ratus delapan puluh milyar sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Berdasarkan Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Kabupaten Minahasa dikelompokkan **berkemampuan** Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 3 = Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per-orang setiap melaksanakan Reses.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 3 JANUARI 2019

BUPATI MINAHASA

ROYKE OCTAVIAN RORING

Di undangkan di Tondano
Pada tanggal 3 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 4